



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIYA NUR HASANAH
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN DAN RISET
3. NHK : 841052

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m²/105 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 1708 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m²/250 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 186 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 639.500.000

1. MOBIL, HONDA CRV MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
2. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 41.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 178.404.956

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.108.904.956

III. HUTANG

Rp. 950.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.158.904.956



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.